



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 202 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 98);
15. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan Roadmap reformasi birokrasi pemerintah daerah;
- b. merumuskan *quick wins*;
- c. merancang rencana manajemen perubahan;
- d. bersama dengan unit / satuan kerja terkait melaksanakan *quick wins*;
- e. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam road map;
- f. melakukan pemeliharaan terhadap area – area yang sudah maju; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 c.q Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Februari 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 202 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	1. Walikota 2. Wakil Walikota	Pengarah	Mengarahkan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi	Rp. 500.000,-	
				Rp. 500.000,-	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	Mengkoordinir Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan	-	
4.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Reformasi birokrasi	-	
Pokja 1 Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Koordinator : Asisten III Bidang Administrasi Umum					
5.	Kepala BKD, Diklat	Ketua Pokja	Sebagaimana ditetapkan Kedua	-	
6.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota		-	
7.	Kepala Bidang Bidang Pengadaan, Kependidikan dan Mutasi ASN	Anggota		-	
8.	Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan ASN	Anggota		-	
9.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ASN	Anggota		-	
10.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bag. Organisasi	Anggota		-	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM	KET
11.	Kasubbag Kelembagaan dan Anjab Bag Organisasi	Anggota		-	
Pokja 2 Penguatan Peraturan Perundang-undangan Koordinator Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra					
12.	Kepala Bagian Hukum	Ketua Pokja	Sebagaimana ketetapan Kedua	-	
13.	Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bag. Hukum	Anggota		-	
14.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Bag. Hukum	Anggota		-	
Pokja 3 Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik Koordinator Asisten III Bidang Administrasi Umum					
15.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua Pokja	Sebagaimana ketetapan Kedua	-	
16.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota		-	
17.	Kepala Bidang Layanan E-Government Diskominfo	Anggota		-	
18.	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo	Anggota		-	
19.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan komunikasi Diskominfo	Anggota		-	
20.	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Anggota		-	
21.	Kasubbag Kelembagaan dan Anjab Bag. Organisasi	Anggota		-	
22.	Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bag. Organisasi	Anggota		-	

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONORARIUM	KET
Pokja 4 Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Koordinator Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra					
	Inspektur	Ketua Pokja		-	
	Kepala Bagian Organisasi	Anggota		-	
	Irban I	Anggota		-	
	Irban II	Anggota		-	
	Irban III	Anggota		-	
	Irban IV	Anggota		-	
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Barenlitbangda	Anggota		-	
	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Anggota		-	
	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bag. Organisasi	Anggota		-	

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR